

PENELITIAN POTENSI, PREFERENSI  
DAN PERILAKU MASYARAKAT  
TERHADAP BANK SYARIAH  
DI WILAYAH JAWA TENGAH DAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RINGKASAN EKSEKUTIF

KERJASAMA



BANK INDONESIA

DENGAN



PUSAT PENELITIAN KAJIAN PEMBANGUNAN  
LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**SEMARANG**  
2000

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan Penelitian	2
	1.3. Kerangka Pikir	3
	1.4. Ruang Lingkup	4
BAB II	METODE PENELITIAN	5
	2.1. Pengumpulan Data	5
	2.2. Pengambilan Sampel	5
	2.3. Analisis Data	5
BAB III	GAMBARAN UMUM DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN	7
	3.1. Tabungan Masyarakat	7
	3.2. Tingkat Pendapatan Responden	8
	3.3. Lapangan Pekerjaan	8
BAB IV	ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH	10
	4.1. Persepsi Terhadap Bunga Bank	10
	4.2. Pengetahuan Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah	10
	4.3. Sikap Terhadap Produk Dan Prinsip Perbankan Syariah	12
	4.4. Preferensi Terhadap Sistem Perbankan Syariah	12
	4.5. Perilaku Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah	12
	4.6. Analisis Logistik Regressi	14
	4.7. Analisis Uji Chow	16
BAB V	KARAKTERISTIK MASYARAKAT DALAM PERBANKAN SYARIAH	17
	5.1. Karakteristik Pengusaha	17
	5.2. Karakteristik Masyarakat	19
BAB VI	PENUTUP	25
	6.1. Kesimpulan	25
	6.2. Rekomendasi	27
	DAFTAR PUSTAKA	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Bank syariah akan dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada *demand* masyarakat akan produk dan jasa bank syariah. Dengan modal UU dan nilai-nilai moral, perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya dapat melayani kebutuhan masyarakat baik dari sisi *surplus pending unit* maupun *deficit spending unit*. Walaupun pengembangan bank syariah secara intensif masih relatif baru ( $\pm$  dua tahun terhitung dari diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 1998), patut diingat bahwa pengembangannya tidak berlandaskan *infant industries argument*, yang berlandaskan proteksi dan keistimewaan-keistimewaan. Sehingga perbedaan pengaturan perbankan syariah dengan konvensional bukan disebabkan perbankan syariah yang masih *infant*, tetapi karena *by its nature* memang perbankan syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan perbankan konvensional. Sebaliknya Bank Indonesia juga tidak meberlakukan bank syariah sebagai *step child* seperti yang terjadi di beberapa negara yang mengembangkan bank syariah dimana bank syariah dapat beroperasi, namun bank sentral tidak menyiapkan perangkat ketentuan yang memungkinkan bank syariah dapat beroperasi secara optimal.

Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggemirakan, baik jaringan maupun volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah bank syariah yang masih kecil. Secara umum per Juli 2000, di seluruh Indonesia terdapat 161 bank umum dengan jumlah kantor sebanyak 6.624 buah, dan terdapat 2.427 BPR, dengan jumlah total asset sebesar Rp. 970 triliun, kredit yang disalurkan sebesar Rp. 279,2 triliun dan dana masyarakat yang dihimpun Rp. 682,5 triliun. Dari seluruh perbankan nasional tersebut sampai dengan saat ini terdapat dua bank umum syariah (yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri), tiga bank umum yang membuka kantor bank syariah (yaitu Bank IFI dengan satu kantor cabang syariah, Bank BNI dengan lima kantor cabang syariah, dan Bank Jabar dengan satu kantor cabang syariah) serta 79 BPR Syariah.

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah terutama di Indonesia. Permasalahan yang muncul antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional. Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah (Subardjo dalam Antonio, 1999):

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.
2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
3. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.
4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.

Kebijakan pengembangan perbankan syariah antara lain adalah mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah, khususnya pada wilayah-wilayah yang dinilai potensial. Dalam rangka mendukung program pengembangan jaringan perbankan syariah diperlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat yang menggambarkan potensi pengembangan bank syariah baik dari sisi penyimpan maupun sisi pembiayaan. Potensi dimaksud dapat dipandang dari sumber daya dan aktivitas perekonomian suatu wilayah serta dari pola sikap/preferensi dari pelaku ekonomi terhadap produk dan jasa bank syariah.

Dalam rangka mengembangkan jaringan perbankan syariah diperlukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah karena perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya *demand* masyarakat terhadap sistem perbankan ini. Oleh karena itu, agar kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah efektif diperlukan informasi mengenai karakteristik dan perilaku nasabah/calon nasabah terhadap perbankan syariah.

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai hal-hal tersebut diperlukan sejalan dengan keinginan agar penyusunan kebijakan Bank Indonesia didasarkan pada hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan (*research-based policy making*).

## **1.2. TUJUAN PENELITIAN**

Sejalan dengan latar belakang pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

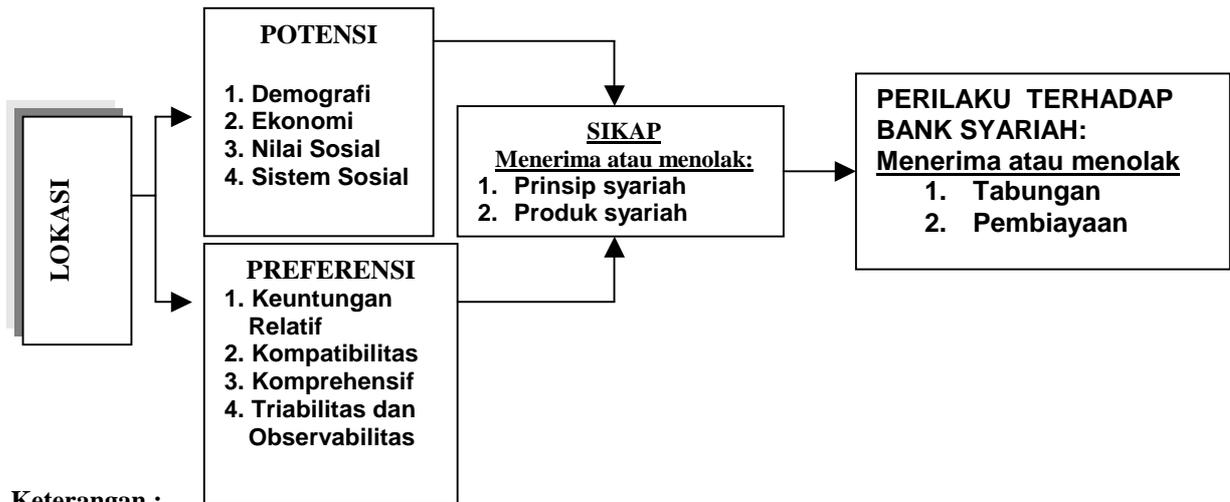
- 1.2.1. Pemetaan (*mapping*) potensi pengembangan jaringan perbankan syariah di wilayah penelitian. Potensi ini dinilai (i) potensi kegiatan ekonomi yang mendukung kelangsungan usaha suatu lembaga bank, serta (ii) kecenderungan masyarakat untuk memilih dan menggunakan jasa perbankan syariah.
- 1.2.2. Mengidentifikasi karakteristik kelompok masyarakat di wilayah penelitian dan perilakunya terhadap bank syariah. Identifikasi ini akan dipakai sebagai masukan untuk meningkatkan efektifitas program sosialisasi perbankan syariah serta penyusunan strategi pemasaran bagi bank-bank syariah yang akan beroperasi di wilayah penelitian.

### 1.3. KERANGKA PIKIR

Kerangka dituangkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar:

**Model Kerangka Pikir  
POTENSI, PREFERENSI DAN PERILAKU MASYARAKAT  
TERHADAP BANK SYARIAH**



**Keterangan :**

**De= Demografi**

- De<sub>1</sub>= Umur
- De<sub>2</sub>= Jenis kelamin
- De<sub>3</sub>= Pendidikan

**Ec=Ekonomi**

- Ec<sub>1</sub>= Penghasilan
- Ec<sub>2</sub>= Status pekerjaan
- Ec<sub>3</sub>= Aksesibilitas wilayah

**Sv=Nilai sosial**

- Sv<sub>1</sub>= Kedudukan sosial
- Sv<sub>2</sub>=Keberagamaan/religiusitas
- Sv<sub>3</sub>= Keterbukaan thd hal baru
- Sv<sub>4</sub>= Aktivitas sosial
- Sv<sub>4</sub>= Mobilitas
- Sv<sub>5</sub>= Tipologi keluarga
- Sv<sub>6</sub>= Status perkawinan

**Ss= Sistem sosial**

- Ss<sub>1</sub>= Norma keluarga
- Ss<sub>2</sub>= Toleransi thd penyimpangan Agama
- Ss<sub>3</sub>= Toleransi perbedaan budaya
- Ss<sub>4</sub>= Akses terhadap informasi

**Pf= Preferensi**

- Pf<sub>1</sub>= keuntungan relatif
- Pf<sub>2</sub>= Kompatibilitas
- Pf<sub>3</sub>= Kompleksitas
- Pf<sub>4</sub>= Triabilitas/  
Observabilitas

**D= Lokasi (Kota/Kabupaten)**

- (Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Boyolali, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kab. Cilacap, Kota Jogja dan Kab. Bantul)

#### **1.4. RUANG LINGKUP**

Di samping informasi yang bersifat umum (dalam rangka mengetahui karakteristik responden) juga diperlukan informasi mengenai perilaku responden yang mencakup sekurang-kurangnya, (1) Pemahaman mengenai sistem bagi hasil, (2) Faktor penting yang menjadi pendorong responden dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan terutama bank syariah serta pengetahuan mereka tentang sistem dan produk bank syariah, (3) Faktor yang berpengaruh dalam mendorong responden untuk berinteraksi dan memahami bank syariah, dan (4) informasi yang diperoleh melalui kontak interpersonal (seperti peer group, tetangga, dll) dari pihak yang memahami dan telah menggunakan jasa bank syariah. Sedangkan cakupan lokasi adalah 15 (lima belas) kabupaten/kota yang berada di Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yaitu Kabupaten Rembang, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Boyolali, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kab. Cilacap, Kota Jogja dan Kab. Bantul.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1. PENGUMPULAN DATA**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui tehnik wawancara dengan kuesioner, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *indepth interview* terutama bagi pelaku ekonomi di Jawa Tengah dan DIY. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dinas/instansi teknis, perbankan, BPS, PEMDA dan lembaga lain dalam rangka identifikasi potensi dari sisi kegiatan ekonomi.

### **2.2. PENGAMBILAN SAMPEL**

Wilayah penelitian untuk Jawa Tengah dan DIY mencakup 15 kabupaten/kota. Pengambilan sampel lokasi didasarkan atas pertimbangan (1) potensi agama (Islam) dan (2) potensi ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi potensi agama (Islam) meliputi: (a) jumlah masjid dan musholla/langgar, (b) proporsi jamaah haji terhadap penduduk muslim dan (c) proporsi penduduk muslim terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Sedangkan potensi ekonomi meliputi (1) tingkat pertumbuhan ekonomi, (2) PDRB perkapita dan (3) proporsi PAD terhadap APBD.

Jumlah responden yang dikumpulkan adalah minimal sebanyak 100 responden untuk setiap Kabupaten/kota, yang terdiri atas: 20 responden rumah tangga produksi dan 80 responden rumah tangga konsumsi. Penentuan lokasi kecamatan terpilih di setiap kabupaten/kota dengan mempertimbangkan konsentrasi penduduk muslim dan penyebarannya. Pengambilan responden dipilih secara *accidental* dengan memperhatikan penyebaran antar kecamatan.

### **2.3. ANALISIS DATA**

Untuk menguji masing-masing item yang ada pada variabel yang diteliti maka akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan teknik *item total correlation* dan teknik *split sample* (belah dua). Untuk mengetahui preferensi dan perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah digunakan metode skoring dan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan antar variabel digunakan *Logistic Regression*.

Estimasi pengembangan bank syariah dari sisi tabungan dan pembiayaan akan digunakan model logit dengan persamaan sebagai berikut : (Gujarati, 1995;555).

$$\frac{P_i}{1 - P_i} = e^{Z_i} \dots\dots\dots (1)$$

di mana

$$Z_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j X_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

jadi

$$\frac{P_i}{1 - P_i} = e^{\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j X_{ij}} \dots\dots\dots (3)$$

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritik maka persamaan (2) tersebut dapat dioperasionalisasikan sebagai berikut:

$$Z_i = \alpha_0 + \sum \alpha_i De_{ij} + \sum \beta_i Ec_{ij} + \sum \chi_1 Sv_i + \sum \delta_1 Ss_i + \sum \phi_i Pf_i \dots\dots\dots (4)$$

Untuk mencapai tujuan ke dua, akan digunakan model alternatif yaitu model *chow test* (Gujarati, 1995; 263 – 264). Dengan menggunakan model tersebut akan diuji apakah perbedaan persamaan regresi antar Kabupaten dan Kota berbeda atau sama. Dengan menggunakan model tersebut dapat dibuat *mapping* mengenai potensi pengembangan bank syariah dan karakteristik kelompok masyarakat dan perilakunya terhadap Bank Syariah.

## BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN

### 3.1. TABUNGAN MASYARAKAT

Pada tahun 1992/1993 jumlah tabungan masyarakat di Jawa Tengah sebesar Rp. 2.32 triliun meningkat menjadi Rp. 6.03 triliun pada tahun 1997/1998. Dengan demikian dapat dihitung tingkat pertumbuhan tabungan masyarakat dalam kurun waktu tersebut yaitu sebesar 19,08 persen. Berdasarkan tingkat pertumbuhan tersebut, maka dapat diketahui jumlah tabungan masyarakat pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp. 10.69 triliun. Bila dilihat secara spasial maka Kota Semarang mempunyai tabungan masyarakat terbesar pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp. 2,65 triliun atau 26,51 persen dari jumlah keseluruhan tabungan masyarakat di Jawa Tengah. Peringkat berikutnya adalah Kota Surakarta dengan jumlah tabungan masyarakat sebesar Rp.1.62 triliun atau 15,24 persen dan Kab. Kudus dengan jumlah sebesar Rp. 563.85 miliar atau 5,27 persen. Sedangkan untuk DIY tingkat pertumbuhan tabungan masyarakat dalam kurun waktu yang sama adalah sebesar 18,66 persen. Pada Tahun 2001 jumlah tabungan masyarakat di DIY dapat dihitung sebesar Rp. 2.15 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp. 1.63 triliun atau 76,08 persen merupakan kontribusi Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul hanya memberikan sumbangan sebesar 7,88 persen atau Rp.169.72 miliar. Data mengenai tabungan masyarakat disajikan pada Tabel 3.1.1.

**TABEL 3.1.1.**  
**JUMLAH TABUNGAN MASYARAKAT TAHUN 1992/1993, 1997/1998,**  
**TINGKAT PERTUMBUHAN DAN PREDIKSI TABUNGAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2001 (JUTAAN RUPIAH)**

NO	KAB./KOTA	TABUNGAN		TINGKAT PERTUMBUHAN	PREDIKSI TABUNGAN 2001
		1992/1993	1997/1998		
1	Kab. Rembang	14.766	38.270	19,05	67.767
2	Kab. Jepara	22.343	102.085	30,39	254.012
3	Kab. Kudus	110.946	306.476	20,32	563.855
4	Kab. Demak	10.106	42.898	28,91	102.130
5	Kota Semarang	688.484	1.599.630	16,86	2.652.742
6	Kab. Kendal	20.944	86.554	28,38	202.779
7	Kota Pekalongan	110.580	237.908	15,32	376.746
8	Kota Tegal	124.037	301.025	17,73	512.429
9	Kab. Brebes	24.818	75.021	22,12	145.691
10	Kab. Boyolali	19.426	53.060	20,10	96.961
11	Kota Surakarta	356.898	922.070	18,98	1.629.655
12	Kota Magelang	118.867	297.730	18,36	516.511
13	Kab. Cilacap	86.123	255.403	21,74	490.332
	Jawa Tengah *)	2.324.118	6.033.802	19,08	10.695.246
1	Kota Yogyakarta	332.166	900.618	19,95	1.638.521
2	Kab. Bantul	33.077	91.920	20,44	169.723
	D I Yogyakarta **)	484.185	1.230.600	18,66	2.153.675

Sumber : KBI Semarang 1993, 1998 ; KBI Yogya 1993, 1998

\*) Jumlah dari 35 Kab./kota

\*\*) Jumlah dari 5 Kab./kota

### 3.2. TINGKAT PENDAPATAN RESPONDEN

Apabila dilihat lebih detail tentang pendapatan keluarga yang dibagi menjadi 4 kategori maka untuk daerah Jawa Tengah, responden yang menyatakan pengeluaran mereka di atas Rp.1.500.000,00 per bulan tercatat hampir 17 persen, terutama di yang cukup besar adalah di Kota Pekalongan dan Kota Semarang yang dinyatakan oleh 37 persen dan 40 persen responden di kedua daerah tersebut. Secara keseluruhan, 43,48 persen responden di Jawa Tengah menyatakan pengeluaran mereka per bulan adalah antara Rp.500.000,00 - Rp.1.000.000,00 dan 25 persen menyatakan di bawah Rp.500.000,00 per bulan, seperti terlihat pada Tabel 3.2.1.

**TABEL 3.2.1.**  
**KELOMPOK PENGELUARAN RESPONDEN**  
**DI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA**

No.	KABUPATEN/KOTA	KELOMPOK PENGELUARAN PER BULAN				TOTAL
		s/d Rp 500.000	Rp 500.001- Rp 1.000.0000	Rp 1.000.001- Rp 1.500.000	> Rp 1.500.000	
1	Kab. Rembang	39	35	11	15	100
2	Kab. Jepara	36	42	19	3	100
3	Kab. Kudus	23	47	20	10	100
4	Kab. Demak	21	45	8	26	100
5	Kota Semarang	11	35	14	40	100
6	Kab. Kendal	43	40	10	7	100
7	Kota Pekalongan	16	28	19	37	100
8	Kota Tegal	29	49	14	8	100
9	Kab. Brebes	25	48	11	16	100
10	Kab. Boyolali	18	42	26	14	100
11	Kota Surakarta	27	57	8	8	100
12	Kota Magelang	23	44	14	19	100
13	Kab. Cilacap	14	52	17	17	100
Total Jawa Tengah		325	564	191	220	1300
Persentase		25,00	43,38	14,69	16,92	100,00
1.	Kota Yogyakarta	10	38	27	25	100
2.	Kab. Bantul	15	32	23	30	100
DI Yogyakarta		25	70	50	55	200
Persentase		12,50	35,00	25,00	27,50	100,00
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		350	634	241	275	1500
Persentase		23,33	42,27	16,07	18,33	100,00

Sumber: Data Primer yang diolah, 2000

### 3.3. LAPANGAN PEKERJAAN

Dilihat dari pekerjaan utama responden, secara keseluruhan responden di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mempunyai pekerjaan utama sebagai pegawai negeri sipil, tercatat sebesar 26,53 persen, kemudian wiraswasta atau berusaha sendiri tercatat 23,53 persen diikuti pegawai swasta sebesar 16,80 persen. Komposisi ini tidak jauh berbeda bila dilihat pada responden yang berdomisili di Jawa Tengah, dan tampak berbeda dengan responden yang berdomisili di DI Yogyakarta di mana urutan pekerjaan utama responden adalah pegawai negeri sipil, berusaha sendiri dengan bantuan tenaga kerja lainnya dan berusaha sendiri. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3.1.

**TABEL 3.3.1.**  
**POTENSI RESPONDEN MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA**  
**DI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA**

No	KABUPATEN/ KOTA	STATUS PEKERJAAN UTAMA									TOTAL
		BERUSH SENDIRI	BERUSH SND TNP BURUH	BERUSH SND DNG BURUH	BURUH/ SWASTA	PNS	TNI/ POLRI	PAMONG DESA	PENSIUN AN	LAIN- NYA	
1.	Kab. Rembang	58	7	3	5	19	3	5			100
2.	Kab. Jepara	11	1	19	31	30	1	4	3		100
3.	Kab. Kudus	26	7	15	16	25	2	2	7		100
4.	Kab. Demak	23	5	23	27	15	4	1	1	1	100
5.	Kota Semarang	24	6	7	15	29		19			100
6.	Kab. Kendal	18	7	11	30	18	3	11	1	1	100
7.	Kota Pekalongan	13	7	28	18	17		2	7	8	100
8.	Kota Tegal	32	2	18	22	18	4	4			100
9.	Kab. Brebes	24	3	18	7	16	1	22	6	3	100
10.	Kab. Boyolali	26	2	7	12	39	1	8	4	1	100
11.	Kota Surakarta	22	2	14	19	40			2	1	100
12.	Kota Magelang	31	3	10	18	26	3	9			100
13.	Kab. Cilacap	13	20	10	9	42		6			100
Total Jawa Tengah		321	72	183	229	334	22	93	31	15	1300
Persentase		24,69	5,54	14,08	17,62	25,69	1,69	7,15	2,38	1,15	100
1.	Kota Yogyakarta	9	6	22	13	35		12		3	100
2.	Kab. Bantul	23	5	18	10	29	1	8		6	100
DI Yogyakarta		32	11	40	23	64	1	20		9	200
Persentase		16,00	5,50	20,00	11,50	32,00	0,50	10,00	0,00	4,50	100
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		353	83	223	252	398	23	113	31	23	1500
Persentase		23,53	5,53	14,87	16,80	26,53	1,53	7,53	2,07	1,53	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2000

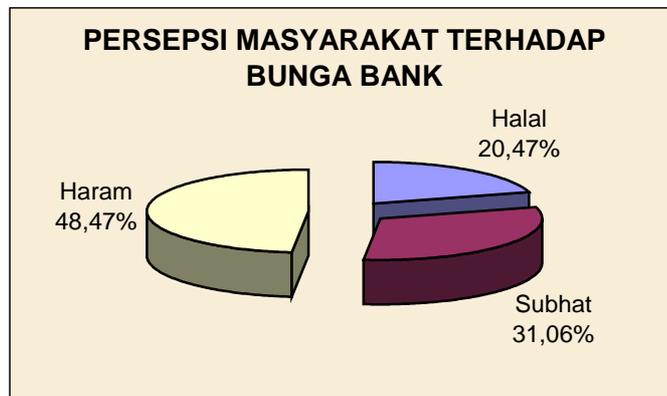
## **BAB IV**

### **ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH**

#### **4.1. PERSEPSI TERHADAP BUNGA BANK**

Persepsi masyarakat terhadap bunga bank terutama di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta ternyata cukup bervariasi. Secara umum dapat dilihat bahwa sebagian besar atau 48,27 persen yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Sedangkan mereka yang menyatakan halal sebesar 20,47 persen, sementara mereka yang menyatakan bahwa bunga bank adalah subhat adalah 31,47 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tidak semuanya mempunyai pandangan bahwa bunga bank merupakan produk perbankan konvensional yang perlu dihindari. Pandangan terhadap bunga bank ini nampaknya juga tidak mempunyai korelasi dengan tipologi daerah keislaman. Daerah-daerah yang mempunyai latar belakang keislaman yang kuat seperti Kab. Rembang, Kab. Jepara dan Kota Tegal terlihat sebagai daerah yang sangat menolak tentang keberadaan bunga bank. Akan tetapi daerah yang mempunyai latar belakang daerah keislaman yang kuat seperti Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan dan Kabupaten Demak ternyata lebih moderat dimana bunga bank dianggap halal oleh sebagian responden.

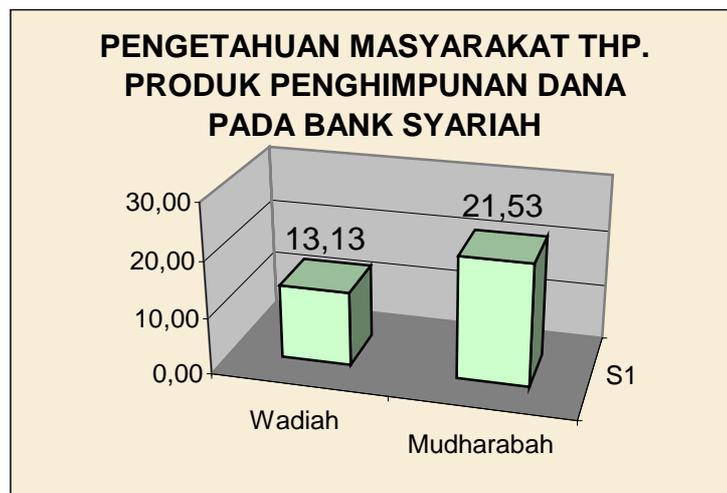
**Garafik .1.**



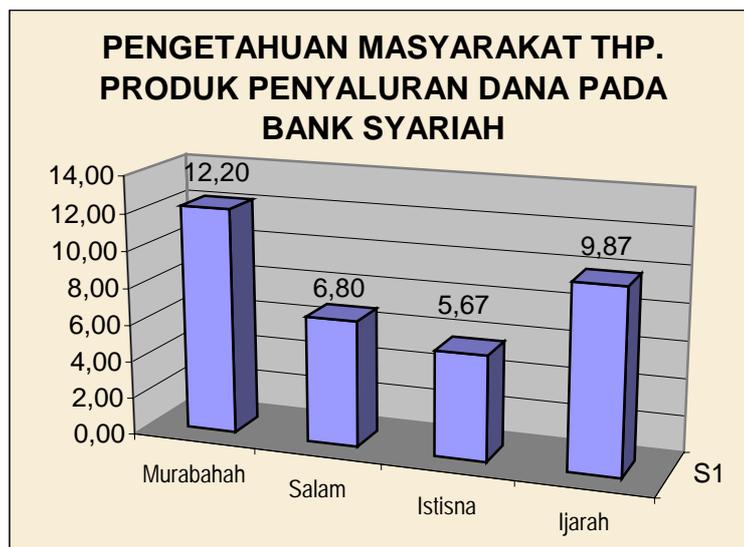
#### **4.2. PENGETAHUAN TERHADAP PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH**

Salah satu faktor yang cukup penting dalam mengkaji pengembangan bank syariah adalah melalui pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Dari sejumlah responden yang dihubungi terutama di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta maka terdapat 70,53 persen yang menyatakan bahwa mereka telah mendengar tentang bank syariah. Pengetahuan ini sebagian besar hanya berkisar pada nama “Bank Syariah” , akan tetapi tentang sistem dan produk bank syariah masih sangat terbatas. Pengetahuan tentang bank syariah ini sebagian besar mereka dapatkan dari teman/saudara. Hasil ini telah memberikan bukti bahwa selama ini bank syariah belum melakukan promosi yang cukup gencar terutama melalui media elektronik maupun media cetak.

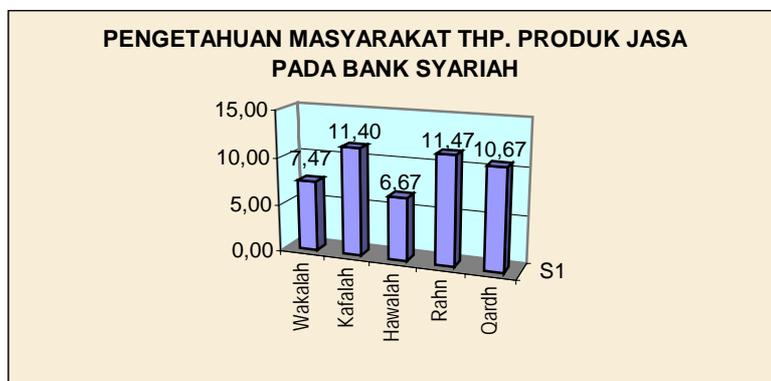
Grafik.2.



Grafik.3.



Grafik.4.



### **4.3. SIKAP TERHADAP PRODUK BANK SYARIAH**

Adanya pengetahuan tentang perbankan syariah tentu saja sangat dipengaruhi sikap masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Dari hasil penelitian ternyata terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak tahu (84,40 persen). Ketidaktahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah ini sebetulnya lebih banyak masih terbatasnya jumlah perbankan syariah yang ada di Jawa Tengah dan DIY, sehingga akan menjadi sangat wajar apabila sebagian masyarakat belum mampu mensikapi produk perbankan syariah.

### **4.4. PREFERENSI TERHADAP SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

1. Secara umum pandangan responden terhadap keuntungan relatif menunjukkan sekitar 51,80 persen yang menyatakan setuju, sangat setuju (1,93 persen) dan hanya 2,27 persen yang menyatakan tidak setuju, sedangkan sisanya adalah sebesar 44,00 persen menyatakan bahwa mereka masih ragu-ragu karena belum mengetahui betul tentang Perbankan Syariah. Besarnya proporsi mereka yang menyetujui terhadap keuntungan relatif ini kemungkinan disebabkan oleh pengetahuan tentang sistem bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syariah.
2. Tingkat kompatibilitas yang menggambarkan tentang pandangan responden tentang kecocokan penerapan sistem bagi hasil maka terlihat ada 45,07 yang menyatakan tidak tahu. Hal ini lebih banyak disebabkan karena sebagian besar responden belum menjadi nasabah perbankan syariah. Sedangkan proporsi terbesar justru mereka yang menyatakan tidak setuju ( 52,93 persen). Hal ini kemungkinan disebabkan belum banyaknya responden yang belum mempunyai pengalaman menjadi nasabah perbankan syariah.
3. Tingkat kompleksitas menggambarkan sampai seberapa jauh Perbankan Syariah mempunyai dimensi universal yang menyangkut aspek ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan terlihat sebagian besar responden atau 63,93 persen yang menyatakan setuju dan 22,60 persen yang menyatakan sangat setuju. Hasil ini mencerminkan bahwa sistem perbankan syariah dianggap mempunyai keuntungan multi dimensi antara lain keuntungan ekonomi, sosial dan agama.
4. Tingkat triabilitas menggambarkan tentang tingkat pencarian informasi yang berkaitan dengan sistem perbankan syariah. Secara keseluruhan terdapat 53,3 persen yang menyatakan setuju dan 17,0 persen yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang tidak setuju terdapat 29,47 persen. Hasil ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden mengaku telah mencoba mencari informasi lebih lanjut berkaitan dengan sistem dan produk perbankan syariah.

### **4.5. PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

Perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek tabungan dan pembiayaan. Pada aspek tabungan terlihat bahwa secara keseluruhan 64,8 persen responden menyatakan bersedia menabung di bank syariah, sedangkan yang tidak ingin sebesar 7,1 persen dan yang masih ragu-

ragu terdapat 28,07 persen. Apabila dilihat masing-masing daerah propinsinya maka di Jawa Tengah terdapat 65,6 persen yang menyatakan berkeinginan untuk menabung di bank syariah dan di DI Yogyakarta sebesar 59,0 persen.

**TABEL 4.5.1**  
**KEINGINAN MASYARAKAT MENABUNG PADA BANK SYARIAH**  
**MENURUT KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA.**

No	KABUPATEN/KOTA	KEINGINAN MASYARAKAT MENABUNG PADA BANK SYARIAH				TOTAL
		TIDAK INGIN	RAGU-RAGU/ TIDAK TAHU	INGIN	SNGAT INGIN	
1	Kab. Rembang	2	27	46	25	100
2	Kab. Jepara	5	17	69	9	100
3	Kab. Kudus	4	18	69	9	100
4	Kab. Demak	25	34	40	1	100
5	Kota Semarang	14	26	57	3	100
6	Kab. Kendal	4	26	67	3	100
7	Kota Pekalongan	12	22	53	13	100
8	Kota Tegal	4	21	68	7	100
9	Kab. Brebes	3	13	66	18	100
10	Kab. Boyolali	5	35	58	2	100
11	Kota Surakarta	2	40	53	5	100
12	Kota Magelang	11	32	52	5	100
13	Kab. Cilacap	4	39	39	18	100
Jawa Tengah		95	350	737	118	1300
Persentase		7,31	26,92	56,69	9,08	100,00
1.	Kota Yogyakarta	9	38	49	4	100
2.	Kab. Bantul	2	33	58	7	100
DIY		11	71	107	11	200
Persentase		5,50	35,50	53,50	5,50	100,00
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		106	421	844	129	1500
Persentase		7,07	28,07	56,27	8,60	100,00

Sumber: Data Primer yang diolah, 2000

Keinginan untuk memperoleh pembiayaan ternyata lebih rendah jika dibanding dengan keinginan masyarakat untuk menabung pada bank syariah. Untuk Jawa Tengah terdapat 55,4 persen yang berkeinginan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah sedangkan untuk DI Yogyakarta adalah 55,1 persen. Apabila dilihat masing-masing daerah maka terlihat bahwa daerah yang potensial adalah Kota Tegal (77,0 persen), Kab. Brebes (71,0 persen) dan Kab. Boyolali (75,0 persen). Proporsi masing-masing daerah dapat terlihat pada Tabel 4.5.2.

**TABEL 4.5.2**  
**KEINGINAN MASYARAKAT MEMPEROLEH PEMBIAYAAN**  
**DARI BANK SYARIAH MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**DI JAWA TENGAH DAN DIY.**

NO	KABUPATEN/KOTA	KEINGINAN MEMPEROLEH PEMBIAYAAN BS				TOTAL
		TIDAK INGIN	RAGU-RAGU/TIDAK TAHU	INGIN	SNGAT INGIN	
1	Kab. Rembang	3	29	34	34	100
2	Kab. Jepara	12	30	50	8	100
3	Kab. Kudus	15	17	56	12	100
4	Kab. Demak	30	27	41	2	100
5	Kota Semarang	29	28	38	5	100
6	Kab. Kendal	24	30	44	2	100
7	Kota Pekalongan	29	32	32	7	100
8	Kota Tegal	13	10	65	12	100
9	Kab. Brebes	11	18	61	10	100
10	Kab. Boyolali	4	21	72	3	100
11	Kota Surakarta	7	50	38	5	100
12	Kota Magelang	13	58	26	3	100
13	Kab. Cilacap	5	33	43	19	100
Jawa Tengah		195	383	600	122	1300
Persentase		15,00	29,46	46,15	9,38	100,00
1.	Kota Yogyakarta	17	39	43	1	100
2.	Kab. Bantul	6	33	52	9	100
DIY		23	72	95	10	200
Persentase		11,50	36,00	47,50	5,00	100,00
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		218	455	695	132	1500
Persentase		14,53	30,33	46,33	8,80	100,00

Sumber: Data Primer yang diolah, 2000

## 4.6. ANALISIS LOGISTIK REGRESSI

### 4.6.1. Keinginan Masyarakat Dalam Menabung

1. Dalam mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk menabung maka semua faktor telah dimasukkan dalam persamaan. Dari hasil perhiungan logistik maka terlihat bahwa variabel umur tidak banyak berpengaruh dengan derajat signifikansi hanya sebesar 0,232. Hal ini berarti bahwa kelompok masyarakat yang menginginkan untuk menabung pada perbankan syariah sangat bervariasi mulai dari usia dibawah 30 tahun hingga usia setelah 50 tahun.
2. Sementara untuk variabel pendidikan maka terlihat bahwa mempunyai faktor negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,304. Hasil ini mencerminkan mereka yang menginginkan untuk menabung justru mempunyai latar belakang pendidikan yang relatif tinggi, hal ini kemungkinan disebabkan dengan tingginya tingkat pendidikan masyarakat maka pengetahuan tentang sistem perbankan syariah lebih banyak dikenal.
3. Sedangkan untuk variabel pengeluaran maka terlihat bahwa mereka yang mempunyai pengeluaran yang lebih besar mempunyai kecenderungan untuk menabung pada perbankan syariah. Hal ini tercermin dari semakin besarnya beta koefisien pada kategori yang telah ditentukan. Adanya

kecenderungan semakin tingginya tingkat pengeluaran ini menjadi sangat logis karena mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran yang tinggi cenderung mempunyai latar belakang ekonomi yang kuat, sehingga ada kemungkinan untuk menabung pada bank syariah.

4. Faktor pekerjaan ternyata juga sangat menarik untuk dikaji. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang menginginkan untuk menabung pada perbankan syariah adalah mereka yang bekerja pada sektor pertanian dan jasa dengan koefisien masing-masing sebesar 0,888 dan 0,569. Meskipun demikian, apabila faktor ini dimasukkan dalam keseluruhan model maka faktor pekerjaan ini tidak mempunyai pengaruh yang cukup dominan.
5. Sementara untuk variabel akses wilayah terlihat bahwa masyarakat yang mempunyai akses wilayah yang rendah justru mempunyai keinginan untuk menabung lebih tinggi jika dibanding masyarakat yang mempunyai akses wilayah yang tinggi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar responden yang menginginkan perbankan syariah adalah mereka yang berada di daerah pedesaan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah masyarakat yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi cenderung untuk mendapatkan fasilitas menabung pada perbankan syariah. Hal ini mengisyaratkan bahwa mereka yang menginginkan menabung pada perbankan syariah adalah responden yang aktif dalam masyarakat dan dipandang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi.

#### **4.6.1. Keinginan Masyarakat Memperoleh Pembiayaan**

1. Pada sisi pembiayaan maka terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terutama pada kelompok umur, hal ini berarti bahwa masyarakat yang menginginkan untuk memperoleh pembiayaan mempunyai karakteristik masyarakat baik yang berumur tua maupun muda. Sementara untuk variabel pendidikan maka juga terlihat adanya pengaruh yang cukup signifikan, hal ini berarti bahwa karakteristik masyarakat yang menginginkan pembiayaan tidak dapat dikarakteristikan berdasarkan tingkat pendidikan.
2. Sementara pada variabel pengeluaran maka terlihat bahwa mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran yang lebih tinggi ada kecenderungan untuk memperoleh pembiayaan pada perbankan syariah. Hasil ini mencerminkan bahwa mereka yang berminat untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah adalah mereka yang mempunyai tingkat pendapatan yang relatif tinggi.
3. Sementara untuk latar belakang pekerjaan maka terlihat bahwa mereka yang bekerja pada sektor industri dan jasa ada kecenderungan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah. Hasil ini mencerminkan bahwa mereka yang menginginkan untuk memperoleh pembiayaan adalah mereka yang mempunyai unit usaha dan sampai saat ini masih dalam skala kecil. Hasil ini juga selaras dengan tingkat pengeluaran mereka dimana mereka adalah kelompok masyarakat yang mempunyai derajat ekonomi yang cukup kuat.
4. Faktor-faktor lain yang cukup berpengaruh pada aspek pembiayaan adalah tingkat aktifitas sosial, penerimaan terhadap hal-hal baru dan pemahaman terhadap sistem syariah. Indikator ini

mencerminkan bahwa mereka yang menginginkan untuk memperoleh pembiayaan adalah mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan mempunyai latar belakang ekonomi yang cukup kuat.

#### 4.7. ANALISIS CHOW TEST

Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah menguji apakah terdapat perbedaan yang berarti dari analisis regresi yang telah diterapkan di atas dengan menggunakan *chow-test*. Uji ini akan memberikan bukti apakah model ada perbedaan antara tiap-tiap kabupaten yang diuji dalam penelitian.

**TABEL 4.7.1.**  
**UJI CHOW PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP ANK SYARIAH**

NO	KABUPATEN	TABUNGAN	PEMBIAYAAN
1	Kab. Rembang	1,924	2,811
2	Kab. Jepara	4,653	9,489
3	Kab. Kudus	3,610	11,456
4	Kab. Demak	12,121	15,173
5	Kota Semarang	11798	16,824
6	Kab. Kendal	3,777	14,922
7	Kota Pekalongan	9,099	16,269
8	Kota Tegal	3,247	10,172
9	Kab. Brebes	2,854	9,421
10	Kab. Boyolali	4,498	3,650
11	Kota Surakarta	1,753	5,844
12	Kota Magelang	8,335	7,420
13	Kab. Cilacap	3,088	4,477
14	Kota Yogyakarta	7,536	10,166
15	Kab. Bantul	1,179	5,378
<b>Chow test</b>		<b>107,5</b>	<b>99,5</b>
<b>F tabel (0,01)</b>		<b>99,5</b>	<b>99,5</b>

Dari hasil perhitungan *Chow-test* ini maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , sehingga diantara 15 kabupaten ini secara signifikan sangat berbeda dengan tingkat kebenaran 99,0 persen. Hal ini membuktikan bahwa perilaku masyarakat dalam menabung dan memperoleh pembiayaan pada masing-masing kabupaten mempunyai karakteristik yang berbeda terutama berkaitan dengan faktor ekonomi, demografi, sistem sosial, nilai sosial dan preferensi pada Perbankan Syariah. Dengan kata lain, masing-masing kabupaten/kota mempunyai ciri-ciri demografi, ekonomi, sistem sosial, nilai sosial serta preferensi yang berbeda satu sama lain

## **BAB V**

### **KARAKTERISTIK MASYARAKAT DALAM PERBANKAN SYARIAH**

#### **5.1. KARAKTERISTIK PENGUSAHA**

Salah satu segmen perbankan yang cukup potensial adalah pengusaha, baik pengusaha kecil, menengah maupun besar. Tanggapan umum pengusaha terhadap kehadiran bank syariah ternyata sangat tinggi, atau dengan kata lain pengusaha sangat mengharapkan kehadiran bank syariah untuk menopang atau mengembangkan usaha mereka. Jumlah responden yang mengaku sebagai pengusaha adalah sebanyak 379 orang. Dari jumlah ini terdapat 252 pengusaha (66,5 persen) yang menginginkan menabung pada bank syariah, sementara pengusaha yang menginginkan memperoleh pembiayaan dari bank syariah adalah sebesar 218 atau 58,1 persen. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 5.1.1.

**TABEL 5.1.1.**  
**KARAKTERISTIK UMUM PENGUSAHA  
TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

No	KEINGINAN TERHADAP BANK SYARIAH	JENIS PELAYANAN PADA BANK SYARIAH			
		MENABUNG		PEMBIAYAAN	
1	Masih ragu pada B.S	102	26,9 %	110	29,0 %
2	Tidak Ingin	28	6,6 %	51	12,9 %
3	Ingin	252	66,5 %	218	58,1 %
Jumlah		379	100,0 %	379	100,0 %

Sumber: Data Primer yang diolah, 2000

Alasan dari beberapa pengusaha yang tertarik untuk menabung dan memperoleh pembiayaan dari bank syariah ini cukup beragam. Dari hasil wawancara dan FGD maka alasan utama mengapa mereka tertarik pada bank syariah ini adalah sistem operasi bank syariah sangat sesuai dengan syariah Islam. Alasan ini nampaknya masih terlalu dini untuk disimpulkan karena setelah diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keuntungan maka faktor kesesuaian dengan syariah Islam ini menjadi melemah. Hal ini berarti bahwa ketertarikan masyarakat terhadap bank syariah masih sangat terbatas pada faktor-faktor yang bersifat emosional, sementara faktor-faktor yang berkaitan dengan akses dan mutu pelayanan belum mendapat perhatian utama. Kondisi ini muncul karena memang saat ini jaringan pelayanan bank syariah sendiri masih sangat terbatas.

**TABEL 5.1.2.**  
**ALASAN PENGUSAHA DALAM MENGINGINKAN/TIDAK**  
**MENGINGINKAN PERBANKAN SYARIAH**

ALASAN PENGUSAHA BAIK INGIN / BANK SYARIAH		JENIS PELAYANAN PADA BANK SYARIAH	
		MENABUNG	PEMBIAYAAN
Menginginkan Bank Syariah			
1	Sesuai syariah Islam	58,5	50,3
2	Aman dan menguntungkan	17,4	12,1
3	Penerapan sistem bagi hasil	6,6	6,9
4	Dekat dengan rumah	6,2	4,6
5	Jika ada uang lebih	5,2	5,1
6	Jauh dari riba	3,6	3,5
7	Lainnya	2,5	17,5
Jumlah		100,0	100,0
		(N=252)	(N=218)

Sumber: Data Primer yang diolah, 2000

Dari hasil penelitian ternyata sebagian besar pengusaha bergerak dibidang perdagangan. Sektor-sektor lainnya seperti Industri dan jasa nampaknya juga sangat mendominasi sektor usaha beberapa pengusaha yang ditemui. Sektor-sektor yang masih sedikit jumlah pengusahanya antara lain gas/listrik, pertanian, transportasi dan komunikasi. Sektor-sektor ini memang merupakan sektor yang membutuhkan modal yang cukup besar. Pengusaha yang bergerak di bidang ini tentu saja merupakan pengusaha yang masuk golongan pengusaha besar. Sektor lain yang justru menarik untuk diperhatikan justru sektor perdagangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang banyak diminati masyarakat. Peranan bank syariah dalam membantu sektor perdagangan ini nampaknya perlu segera direalisasi karena merupakan sektor yang cukup potensial (lihat Tabel 5.1.3).

**TABEL 5.1.3.**  
**BIDANG USAHA BAGI PENGUSAHA**  
**YANG MENGINGINKAN/TIDAK MENGINGINKAN**  
**PERBANKAN SYARIAH**

BIDANG USAHA		JENIS PELAYANAN PADA BANK SYARIAH	
		MENABUNG	PEMBIAYAAN
Menginginkan Bank Syariah			
1	Pertanian	2,2	1,8
2	Industri	28,2	26,6
3	Listrik/Gas bumi	0,3	0,5
4	Konstruksi	3,4	2,8
5	Perdagangan	41,0	45,0
6	Komunikasi	1,1	1,8
7	Transportasi	0,3	0,9
8	Jasa	12,7	20,6
Jumlah		100,0	100,0
		(N=252)	(N=218)

Sumber: Data Primer yang diolah, 2000

## 5.2. KARAKTERISTIK MASYARAKAT

### 5.2.1. Keinginan Menabung Pada Perbankan Syariah

Berdasarkan tingkat pengeluaran keluarga maka terlihat bahwa untuk Kabupaten Rembang maka sebagian besar mereka yang menginginkan untuk menabung adalah mereka yang mempunyai pendapatan sekitar Rp.500.000 – Rp.1.000.000,-. Karakteristik ini juga muncul di Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak. Sementara untuk Kota Semarang mempunyai karakter yang cukup berbeda dimana sebagian besar adalah mereka yang mempunyai pendapatan lebih dari 1,5 juta rupiah. Sementara untuk Kabupaten/Kota lainnya terlihat sebagian besar mempunyai tingkat pengeluaran sekitar Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000.

**TABEL 5.2.1.1.**  
**KARAKTERISTIK PENGELUARAN YANG INGIN MENABUNG**  
**PADA PERBANKAN SYARIAH DI JAWA TENGAH DAN DIY**

No	KAB/KOTA	PENGELUARAN				TOTAL
		< 500.000	500.000-1 JUTA	1-1.5 JUTA	> 1.5 JUTA	
1	Kab. Rembang	25	25	8	13	71
		35,2%	35,2%	11,3%	18,3%	100,0%
2	Kab. Jepara	26	33	16	3	78
		33,3%	42,3%	20,5%	3,8%	100,0%
3	Kab. Kudus	15	38	17	8	78
		19,2%	48,7%	21,8%	10,3%	100,0%
4	Kab. Demak	4	17	4	16	41
		9,8%	41,5%	9,8%	39,0%	100,0%
5	Kota Semarang	6	17	11	26	60
		10,0%	28,3%	18,3%	43,3%	100,0%
6	Kab. Kendal	23	31	9	7	70
		32,9%	44,3%	12,9%	10,0%	100,0%
7	Kota Pekalongan	10	16	16	24	66
		15,2%	24,2%	24,2%	36,4%	100,0%
8	Kota Tegal	19	40	10	6	75
		25,3%	53,3%	13,3%	8,0%	100,0%
9	Kab. Brebes	16	43	10	15	84
		19,0%	51,2%	11,9%	17,9%	100,0%
10	Kab. Boyolali	13	24	15	8	60
		21,7%	40,0%	25,0%	13,3%	100,0%
11	Kota Surakarta	17	30	5	6	58
		29,3%	51,7%	8,6%	10,3%	100,0%
12	Kota Magelang	11	27	10	9	57
		19,3%	47,4%	17,5%	15,8%	100,0%
13	Kab. Cilacap	9	28	7	13	57
		15,8%	49,1%	12,3%	22,8%	100,0%
Jawa Tengah		194	369	138	154	855
		22,69%	43,16%	16,14%	18,01%	100,00%
14	Kota Yogyakarta	5	17	18	13	53
		9,40%	32,10%	34,00%	24,50%	100,00%
15	Kab. Bantul	10	17	16	22	65
		15,40%	26,20%	24,60%	33,80%	100,00%
DI Yogyakarta		15	34	34	35	118
		12,71%	28,81%	28,81%	29,66%	100,00%
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		209	403	172	189	973
		8,90%	31,90%	32,00%	27,20%	100,00%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2000

Sedangkan berdasarkan latar belakang pekerjaan maka terlihat bahwa sebagian besar responden yang menginginkan perbankan syariah adalah mereka yang bekerja pada sektor pemerintahan (25,2 persen), perdagangan (22,0 persen) dan hanya 5,1 persen yang bekerja pada sektor pertanian. Dari hasil ini terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang cukup nyata antara masing-masing kabupaten/kota.

**TABEL 5.2.1.2.**  
**KARAKTERISTIK PEKERJAAN YANG INGIN MENABUNG**  
**PADA PERBANKAN SYARIAH DI JAWA TENGAH DAN DIY**

No	KAB/KOTA	JENIS PEKERJAAN						TOTAL
		PERTANIAN	INDUSTRI	PERDAGANGAN	JASA	PEMERINTAHAN	LAINNYA	
1	Kab. Rembang	12	2	21	19	9	8	71
		16,9%	2,8%	29,6%	26,8%	12,7%	11,3%	100,0%
2	Kab. Jepara		21	9	7	22	19	78
			26,9%	11,5%	9,0%	28,2%	24,4%	100,0%
3	Kab. Kudus	3	9	18	16	18	14	78
		3,8%	11,5%	23,1%	20,5%	23,1%	17,9%	100,0%
4	Kab. Demak	2	5	6	12	10	6	41
		4,9%	12,2%	14,6%	29,3%	24,4%	14,6%	100,0%
5	Kota Semarang		3	14	10	15	18	60
			5,0%	23,3%	16,7%	25,0%	30,0%	100,0%
6	Kab. Kendal	3	1	31	5	10	20	70
		4,3%	1,4%	44,3%	7,1%	14,3%	28,6%	100,0%
7	Kota Pekalongan	1	9	24	10	13	9	66
		1,5%	13,6%	36,4%	15,2%	19,7%	13,6%	100,0%
8	Kota Tegal	2	9	17	16	19	12	75
		2,7%	12,0%	22,7%	21,3%	25,3%	16,0%	100,0%
9	Kab. Brebes	7	4	18	7	11	37	84
		8,3%	4,8%	21,4%	8,3%	13,1%	44,0%	100,0%
10	Kab. Boyolali	9	7	8	5	24	7	60
		15,0%	11,7%	13,3%	8,3%	40,0%	11,7%	100,0%
11	Kota Surakarta		4	5	20	19	10	58
			6,9%	8,6%	34,5%	32,8%	17,2%	100,0%
12	Kota Magelang	1	3	13	13	7	20	57
		1,8%	5,3%	22,8%	22,8%	12,3%	35,1%	100,0%
13	Kab. Cilacap	2	7	16	4	22	6	57
		3,5%	12,3%	28,1%	7,0%	38,6%	10,5%	100,0%
Jawa Tengah		42	84	200	144	199	186	855
		4,91%	9,82%	23,39%	16,84%	23,27%	21,75%	100,00%
14	Kota Yogyakarta	1	4	6	10	15	8	44
		2,30%	9,10%	13,60%	22,70%	34,10%	18,20%	100,00%
15	Kab. Bantul	7	5	10	9	22	8	61
		11,50%	8,20%	16,40%	14,80%	36,10%	13,10%	100,00%
DI Yogyakarta		8	9	16	19	37	16	105
		7,62%	8,57%	15,24%	18,10%	35,24%	15,24%	100,00%
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		50	93	216	163	236	202	960
		5,10%	9,90%	22,00%	16,50%	25,20%	21,30%	100,00%

Guna mencari kaitan masing-masing faktor antara potensi demografi, ekonomi, nilai sosial, sistem sosial dan tingkat preferensi maka dilakukan penggabungan skor. Faktor demografi yang dihitung melalui variabel umur dan pendidikan. Faktor ekonomi diukur melalui variabel pengeluaran dan akse wilayah. Faktor sistem sosial diukur melalui variabel norma keluarga, toleransi penyimpangan agama serta akses wilayah. Faktor sistem sosial diukur melalui kedudukan sosial, religiusitas, aktifitas sosial, mobilitas dan tipologi keluarga. Dari hasil perhitungan hubungan variabel tersebut maka dihasilkan tingkat probabilitas keinginan menabung. Karakteristik masyarakat yang berkeinginan menabung pada perbankan syariah mempunyai karakteristik yang beragam. Karakteristik yang mendukung pada perbankan syariah banyak muncul pada Kota Pekalongan dan Kota Yogyakarta.

**TABEL 5.2.1.3.**  
**KARAKTERISTIK RESPONDEN**  
**YANG MENINGINKAN MENABUNG DI PERBANKAN SYARIAH**  
**MENURUT POTENSI DEMOGRAFI, EKONOMI, NILAI DAN SISTEM SOSIAL**

No	Kabupaten/Kota	Kategori				
		Demografi	Ekonomi	Nilai Sosial	Sistem Sosial	Karakteristik
1	Kab. Rembang	Rendah	Rendah	tidak responsif	tertutup	Tidak potensial
2	Kab. Jepara	Rendah	Rendah	tidak responsif	terbuka	Tidak potensial
3	Kab. Kudus	Rendah	Rendah	kurang responsif	sangat tertutup	Tidak potensial
4	Kab. Demak	Rendah	Rendah	responsif	sangat tertutup	tidak potensial
5	Kota Semarang	Rendah	sangat tinggi	tidak responsif	sangat tertutup	tidak potensial
6	Kab. Kendal	Rendah	sangat rendah	sangat responsif	terbuka	kurang potensial
7	Kota Pekalongan	Sedang	sangat tinggi	sangat responsif	terbuka	sangat potensial
8	Kota Tegal	Rendah	sangat tinggi	responsif	tertutup	kurang potensial
9	Kab. Brebes	Sedang	Tinggi	sangat responsif	sangat terbuka	Potensial
10	Kab. Boyolali	Sedang	sangat rendah	tidak responsif	sangat tertutup	tidak potensial
11	Kota Surakarta	Sedang	sangat tinggi	tidak responsif	tertutup	Tidak potensial
12	Kota Magelang	Sedang	sangat tinggi	kurang responsif	sangat tertutup	Kurang potensial
13	Kab. Cilacap	Rendah	rendah	sangat responsif	tertutup	Potensial
14	Kota Yogyakarta	Sangat Tinggi	sangat tinggi	sangat responsif	sangat terbuka	Sangat potensial
15	Kab. Bantul	Tinggi	Tinggi	kurang responsif	terbuka	Kurang potensial

Sumber : Data primer yang diolah, 2000.

### 5.2.2. Keinginan Memperoleh Pembiayaan Dari Perbankan Syariah

Karakteristik pengeluaran responden yang ingin memperoleh pembiayaan adalah hampir merata pada tiap-tiap Kabupaten/Kota dimana sebagian besar adalah masuk dalam kelompok masyarakat menengah dengan pengeluaran sekitar Rp.500.000 – Rp.1.000.000. Hasil ini mencerminkan bahwa perbankan syariah banyak diminati oleh masyarakat dengan penghasilan menengah.

**Tabel 5.2.2.1.**  
**Karakteristik Pengeluaran Yang Ingin Memeroleh Pembiayaan**  
**Pada Perbankan Syariah di Jawa Tengah dan DIY**

No	Kab/Kota	Pengeluaran				Total
		< 500.000	500.000-1 juta	1-1.5 juta	> 1.5 juta	
1	Kab. Rembang	28	21	7	12	68
		41,2%	30,9%	10,3%	17,6%	100,0%
2	Kab. Jepara	13	28	14	3	58
		22,4%	48,3%	24,1%	5,2%	100,0%
3	Kab. Kudus	10	34	16	8	68
		14,7%	50,0%	23,5%	11,8%	100,0%
4	Kab. Demak	6	19	4	14	43
		14,0%	44,2%	9,3%	32,6%	100,0%
5	Kota Semarang	5	7	9	22	43
		11,6%	16,3%	20,9%	51,2%	100,0%
6	Kab. Kendal	17	23	3	3	46
		37,0%	50,0%	6,5%	6,5%	100,0%
7	Kota Pekalongan	6	12	9	12	39
		15,4%	30,8%	23,1%	30,8%	100,0%
8	Kota Tegal	17	42	13	5	77
		22,1%	54,5%	16,9%	6,5%	100,0%
9	Kab. Brebes	16	35	6	14	71
		22,5%	49,3%	8,5%	19,7%	100,0%
10	Kab. Boyolali	13	30	20	12	75
		17,3%	40,0%	26,7%	16,0%	100,0%
11	Kota Surakarta	11	22	6	4	43
		25,6%	51,2%	14,0%	9,3%	100,0%
12	Kota Magelang	5	15	6	3	29
		17,2%	51,7%	20,7%	10,3%	100,0%
13	Kab. Cilacap	10	30	9	13	62
		16,1%	48,4%	14,5%	21,0%	100,0%
Jawa Tengah		157	318	122	125	722
		19,78%	51,65%	10,99%	17,58%	100,00%
14	Kota Yogyakarta	3	15	8	18	44
		6,80%	34,10%	18,20%	40,90%	100,00%
15	Kab. Bantul	12	29	10	10	61
		19,70%	47,50%	16,40%	16,40%	100,00%
DI Yogyakarta		15	44	18	28	105
		14,29%	41,90%	17,14%	26,67%	100,00%
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		172	362	140	153	827
		8,90%	31,90%	32,00%	27,20%	100,00%

Sedangkan berdasarkan karakteristik pekerjaan maka dapat dilihat bahwa sebagian besar mempunyai pekerjaan pegawai negeri ( 27,6%), perdagangan ( 21,8%), dan Jasa ( 16,4%). Hasil ini mencerminkan bahwa sebagian besar adalah bekerja pada sektor swasta, dan ini merupakan potensi yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Karakter berdasarkan kabupaten/kota dapat terlihat pada Tabel 5.2.2.2.

**Tabel 5.2.2.2.**  
**Karakteristik Pekerjaan Yang Ingin Memperoleh Pembiayaan**  
**Dari Perbankan Syariah di Jawa Tengah dan DIY**

No	Kab/Kota	Jenis pekerjaan						Total
		pertanian	industri	perdagangan	jasa	pemerintahan	lainnya	
1	Kab. Rembang	12	4	22	16	8	6	68
		17,6%	5,9%	32,4%	23,5%	11,8%	8,8%	100,0%
2	Kab. Jepara		21	8	2	15	12	58
			36,2%	13,8%	3,4%	25,9%	20,7%	100,0%
3	Kab. Kudus	3	5	17	15	17	11	68
		4,4%	7,4%	25,0%	22,1%	25,0%	16,2%	100,0%
4	Kab. Demak	2	2	12	12	8	7	43
		4,7%	4,7%	27,9%	27,9%	18,6%	16,3%	100,0%
5	Kota Semarang		1	9	10	13	10	43
			2,3%	20,9%	23,3%	30,2%	23,3%	100,0%
6	Kab. Kendal	3		15	5	9	14	46
		6,5%		32,6%	10,9%	19,6%	30,4%	100,0%
7	Kota Pekalongan		6	12	5	9	7	39
			15,4%	30,8%	12,8%	23,1%	17,9%	100,0%
8	Kota Tegal	2	11	18	14	21	11	77
		2,6%	14,3%	23,4%	18,2%	27,3%	14,3%	100,0%
9	Kab. Brebes	6	5	12	8	9	31	71
		8,5%	7,0%	16,9%	11,3%	12,7%	43,7%	100,0%
10	Kab. Boyolali	11	7	14	6	30	7	75
		14,7%	9,3%	18,7%	8,0%	40,0%	9,3%	100,0%
11	Kota Surakarta		3	3	13	18	6	43
			7,0%	7,0%	30,2%	41,9%	14,0%	100,0%
12	Kota Magelang		3	7	7	4	8	29
			10,3%	24,1%	24,1%	13,8%	27,6%	100,0%
13	Kab. Cilacap	1	7	15	4	30	5	62
		1,6%	11,3%	24,2%	6,5%	48,4%	8,1%	100,0%
Jawa Tengah		40	75	164	117	191	135	722
		4,91%	9,82%	23,39%	16,84%	23,27%	21,75%	100,00%
14	Kota Yogyakarta	1	4	6	10	15	8	44
		2,30%	9,10%	13,60%	22,70%	34,10%	18,20%	100,00%
15	Kab. Bantul	7	5	10	9	22	8	61
		11,50%	8,20%	16,40%	14,80%	36,10%	13,10%	100,00%
DI Yogyakarta		8	9	16	19	37	16	105
		7,62%	8,57%	15,24%	18,10%	35,24%	15,24%	100,00%
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		48	84	180	136	228	151	827
		5,10%	9,90%	22,00%	16,50%	25,20%	21,30%	100,00%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2000

Berdasarkan hasil skoring terhadap masing-masing variabel maka Karakteristik masyarakat yang mempunyai keinginan untuk memperoleh pembiayaan perbankan syariah ternyata hanya ada tiga daerah yang mendukung antara lain Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap dan Kota Yogyakarta .

**TABEL 5.2.2.3.**  
**KARAKTERISTIK RESPONDEN**  
**YANG MENINGINKAN MEMPEROLEH PEMBIAYAAN DARI PERBANKAN SYARIAH**  
**MENURUT POTENSI DEMOGRAFI, EKONOMI, NILAI DAN SISTEM SOSIAL**

No	Kabupaten/Kota	Kategori				Karakteristik
		Demografi	Ekonomi	Nilai Sosial	Sistem Sosial	
1	Kab. Rembang	Rendah	Rendah	tidak responsif	tertutup	Tidak potensial
2	Kab. Jepara	Rendah	Tinggi	tidak responsif	terbuka	tidak potensial
3	Kab. Kudus	Sedang	Rendah	kurang responsif	sangat tertutup	tidak potensial
4	Kab. Demak	Rendah	Rendah	kurang responsif	sangat tertutup	tidak potensial
5	Kota Semarang	Sedang	sangat tinggi	tidak responsif	sangat tertutup	tidak potensial
6	Kab. Kendal	Sedang	sangat rendah	sangat responsif	tertutup	kurang potensial
7	Kota Pekalongan	Tinggi	sangat tinggi	responsif	sangat terbuka	sangat potensial
8	Kota Tegal	Sedang	Tinggi	responsif	tertutup	kurang potensial
9	Kab. Brebes	Sedang	Tinggi	responsif	sangat terbuka	potensial
10	Kab. Boyolali	Sedang	Rendah	tidak responsif	sangat tertutup	tidak potensial
11	Kota Surakarta	Tinggi	sangat tinggi	tidak responsif	terbuka	kurang potensial
12	Kota Magelang	Tinggi	Tinggi	responsif	sangat tertutup	kurang potensial
13	Kab. Cilacap	Sedang	Rendah	sangat responsif	terbuka	potensial
14	Kota Yogyakarta	Sangat tinggi	sangat tinggi	sangat responsif	sangat terbuka	Sangat potensial
15	Kab. Bantul	Tinggi	Tinggi	kurang responsif	terbuka	kurang potensial

Sumber : Data primer yang diolah, 2000.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan terhadap potensi, preferensi, sikap dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Potensi demografi yang meliputi antara lain umur dan pendidikan menunjukkan bahwa keluarga-keluarga yang ada di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta masuk dalam kategori yang berumur tua serta mempunyai rata-rata pendidikan yang relatif tinggi.
2. Potensi ekonomi yang menunjukkan tentang aksesibilitas wilayah serta tingkat pengeluaran keluarga maka terlihat bahwa terdapat kabupaten dengan kategori sangat tinggi antara lain Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal , Kota Tegal, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Sementara untuk yang masuk dalam kategori rendah antara lain kabupaten-kabupaten Rembang, Jepara,Kudus, Demak , Boyolali dan Cilacap.
3. Potensi nilai sosial yang menunjukkan respon masyarakat pada hal-hal yang baru menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang sangat responsif adalah Kota Pekalongan dan Kabupaten Cilacap. Sedangkan daerah yang kurang responsif terdapat di Kabupaten Kudus, Kab. Demak, Kota Tegal dan Kabupaten Boyolali.
4. Potensi sistem sosial yang mencerminkan derajat keaktifan sosial terlihat bahwa kabupaten-kabupaten Kudus, Demak dan Kota Semarang merupakan daerah yang sangat tertutup. Sementara daerah yang terbuka terdapat pada Kabupaten Rembang, Kab. Jepara, Kab. Kendal, Kota Pekalongan, dan Kab. Bantul.
5. Preferensi terhadap keuntungan relatif yang mencerminkan pandangan responden tentang perbankan syariah mempunyai nilai lebih jika dibandingkan dengan bank konvensional maka terlihat Kota Magelang dan Kota Semarang merupakan daerah yang mempunyai proporsi terbesar terhadap nilai keuntungan relatif pada bank syariah.
6. Preferensi terhadap tingkat kompatibilitas yang menunjukkan tingkat kecocokan terhadap sistem perbankan syariah maka terlihat bahwa sebagian besar masyarakat tidak setuju terhadap tingkat kompatibilitas dari perbankan syariah. Tingkat kompatibilitas terendah terlihat pada Kabupaten Demak, Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.
7. Preferensi terhadap tingkat kompleksitas perbankan syariah yang menunjukkan nilai dimana perbankan syariah mempunyai dimensi yang kompleks maka terlihat sebagian besar masyarakat setuju terhadap tingkat kompleksitas perbankan syariah.
8. Preferensi terhadap tingkat triabilitas/observabilitas yang menunjukkan derajat keingin-tahuan masyarakat terhadap perbankan syariah maka terlihat bahwa Kabupaten Brebes dan Kota Semarang merupakan daerah dengan derajat keingintahuan yang tertinggi.

9. Tingkat preferensi masyarakat yang merupakan gabungan dari indikator-indikator keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas dan triabilitas terhadap perbankan syariah menunjukkan bahwa daerah yang paling tinggi terdapat pada Kabupaten Brebes, Kota Surakarta dan Kabupaten Cilacap.
10. Sikap masyarakat yang meliputi sikap terhadap sistem dan produk perbankan syariah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui sistem maupun produk perbankan syariah. Meskipun demikian, ada beberapa daerah yang mempunyai proporsi terbesar berkaitan dengan pengetahuan tentang sistem dan produk terdapat pada Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal.
11. Perilaku masyarakat yang dilihat dari dua aspek masing-masing keinginan masyarakat untuk menabung dan memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah. Ada sekitar 59,00 persen yang menginginkan menabung di perbankan syariah dan 55,11 persen yang menyatakan menginginkan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah. Ditinjau dari pengembangan Bank Syariah di Jawa Tengah maupun DIY dapat dilihat bahwa pengembangan perbankan syariah mempunyai prospek yang mengembirakan. Hal ini tercermin dimana sebagian besar responden mempunyai respon yang positif meskipun mereka belum mengenal tentang sistem dan produk-produk perbankan syariah.
12. Uji kolinieritas antara sikap dan perilaku menunjukkan nilai  $T=3,712$  dengan derajat signifikansi sebesar 99,0 persen dengan derajat toleransi  $(1)/VIF=1$ . Hal ini berarti ada derajat kolinieritas antara sikap dan perilaku artinya bahwa semakin tinggi positif sikap masyarakat terhadap perbankan syariah akan diikuti pula semakin tingginya probabilitas untuk menabung maupun memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah.
13. Hasil perhitungan dengan logistik regresi maka terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata pada masing-masing Kabupaten/Kota berkaitan dengan kelompok umur, pendidikan, pengeluaran dan latar belakang pekerjaan.
14. Pada sisi tabungan maka terlihat bahwa faktor yang paling menentukan adalah variabel aktifitas sosial, penerimaan terhadap hal baru serta pemahaman sistem bank syariah yang mempunyai sifat komprehensif.
15. Pada sisi pembiayaan maka terlihat faktor-faktor yang banyak berpengaruh adalah variabel aktifitas sosial, keterbukaan terhadap hal-hal baru, perbedaan ras, serta pemahaman tentang sistem syariah yang komprehensif.
16. Hasil perhitungan interaksi antara faktor potensi dan preferensi terhadap perilaku masyarakat pada perbankan syariah menunjukkan bahwa penurunan tingkat potensi masyarakat tidak berpengaruh terhadap probabilitas keinginan untuk, menabung maupun memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah. Hal ini mengisyaratkan bahwa intervensi terhadap peningkatan preferensi masyarakat akan merupakan faktor yang dominan bagi pengembangan perbankan syariah di Jawa Tengah maupun DI Yogyakarta.
17. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis logit-probit antara potensi dan preferensi terhadap keinginan untuk menabung pada perbankan syariah maka dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok/kategori masing-masing sangat potensial (67,33 - 84,00), potensial (50,67 - 67,32) dan

kurang potensial (34,00 – 50,66). Sedangkan kategori keinginan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah adalah sangat potensial ( 59,00 – 77,00), potensial ( 41,00 – 58,99) dan kurang potensial (23,00 – 40,99).

18. Pemetaan terhadap keinginan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah yang masuk dalam kategori kurang potensial adalah Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Magelang. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya upaya mencari informasi mengenai perbankan syariah.
19. Uji chow membuktikan bahwa diantara 15 kabupaten yang ada, mempunyai perbedaan yang cukup berarti. Hal ini berarti bahwa keinginan masyarakat berhubungan dengan bank syariah harus dikaji masing-masing daerah, karena kondisi potensi dan preferensi mereka sangat bervariasi.
20. Dari chow-test maka terlihat bahwa masing-masing mempunyai kondisi yang spesifik sehingga perlu dilihat secara detail pada masing-masing kabupaten yang meliputi karakteristik masyarakat berdasar kategori keinginan menabung, tidak ada keinginan untuk menabung, keinginan memperoleh pembiayaan dan tidak keinginan untuk memperoleh pembiayaan pada perbankan syariah.

## **6.2. REKOMENDASI**

Dari hasil studi maka telah diketahui bahwa guna pengembangan perbankan syariah di Jawa Tengah dan DIY perlu diperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk berhubungan dengan bank syariah maupun mereka yang masih ragu-ragu terhadap bank syariah. Guna peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu lebih ditingkatkan upaya sosialisasi yang intensif baik melalui media interpersonal (kyai/ulama), media elektronik maupun media cetak. Upaya ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas sistem dan produk perbankan syariah karena masih adanya pandangan masyarakat yang terlalu berlebihan dimana mereka mengharap bahwa perbankan syariah mampu memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah dari bank konvensional serta bunga tabungan yang relatif lebih tinggi dari perbankan konvensional.
2. Upaya sosialisasi yang intensif terutama berkaitan dengan keunggulan komparatif dari perbankan syariah. Upaya ini perlu ditempuh mengingat bahwa keraguan ini sebagian besar disebabkan oleh belum pemahannya masyarakat tentang sistem dan produk perbankan syariah.
3. Bagi kelompok yang sudah dan ingin berhubungan dengan perbankan syariah harus dijaga rasa simpatinya jangan sampai dikecewakan, karena sekali dikecewakan upaya pemulihannya memerlukan waktu dan upaya tidak sedikit.
4. Perlu pengembangan aspek legalitas dari sistem *dual banking system*.
5. Perbankan syariah harus mampu memberikan pemahaman kepada konsumen, hal ini dapat dilakukan dengan membentuk asosiasi perbankan syariah.

6. Berdasarkan hasil perhitungan interaksi antara faktor potensi dan preferensi, maka faktor potensi tidak berpengaruh terhadap keinginan untuk menabung dan memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah. Oleh karena itu bagi para investor atau pihak lain yang terkait perlu memberikan tekanan pada faktor preferensi yang meliputi peningkatan pemahaman baik sistem maupun produk perbankan syariah.
7. Perlu dilakukan studi lebih lanjut bagi pendirian bank syariah di kabupaten/kota karena masing-masing daerah mempunyai karakter yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djameludin, 1995, "Tehnik Penyusunan Skala Pengukur", Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Antonio, M.Syafei, 1999, "Bank syariah : Suatu Pengenalan Umum ", Tazkia Institute dan Bank Indonesia, Jakarta.
- Antonio, M.Syafei, 1999, "Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan", Tazkia Institute dan Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2000, "Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah".
- Bank Indonesia, 2000, "Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Bank Syariah ".
- Gibson L, James, Ivancevic, John M., Donnelly, James H., 1987, "Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gujarati, Damodar N. 1995. Basic Econometric. Mc Graw-Hill International Edition.
- Kaynak, E and Yavas, 1985, "Segmenting the Banking Market by Account Usage : An Empirical Investigation", Journal of Profesional Services Marketing, Vol.1 No.1/2.
- Loudon, David.L. and Bitta A.D., 1984. "Consumer Behaviour : Concepts and Applications", Mc Graw Hill, Singapore.
- Pindick, Robert S., and Rubenfield, Daniel. 1981. Econometric Models and Economic Forecast. International Student Edition, Mc Graw-Hill.
- Presley, John R and Hummayon Dar, 1999, "Attitudes Towards Islamic Finance : An Update of Empirical Evidence", 7th Intensive Orientation Courses : Islamic Economic, Banking & Finance, Leicester, UK.